



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI MUKTIYANTO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, SUMBER DAYA, DAN UMUM
3. NHK : 545598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.074.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 438 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 87.600.000
3. Tanah Seluas 515 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, Rp. 103.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/215 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
5. Tanah Seluas 295 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, Rp. 59.000.000
6. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **832.100.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOTOR, HONDA MIO MIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 2013 TOYOTA YARIS 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. MOTOR, HONDA TIGER CUSTOM HONDA TIGER CUSTOM



Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

6. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE Tahun 2024,

HASIL SENDIRI Rp. 675.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.099.408.351
F. HARTA LAINNYA	Rp.	80.000.000
Sub Total	Rp.	5.086.108.351
III. HUTANG	Rp.	557.013.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.529.095.351

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.